



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

LAPORAN ANALISA PERBANDINGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENSTRA
2021-2026



RENSTRA
2025-2029

Analisis Komparatif | Evaluasi Substansi | Penguatan Arah Kinerja Strategis

RENSTRA
2021-2026

RENSTRA
2025-2029

TAHUN PENYUSUNAN

2026

I. Pendahuluan

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran objektif mengenai perbandingan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra sebelumnya dengan periode Renstra yang baru. Analisis dilakukan terhadap dokumen IKU Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah pada Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029. Perbandingan dilakukan secara sistematis dengan melihat perubahan indikator, definisi operasional, formula pengukuran, baseline, target, serta orientasi pencapaian kinerja pada masing-masing periode. Analisis tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai kesinambungan, perubahan, relevansi, dan tingkat tantangan IKU dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan pendekatan tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan IKU antarperiode sekaligus menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pengelolaan kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah.

II. Dasar dan Kerangka Penilaian

Penilaian tingkat tantangan menggunakan 14 dimensi yang meliputi antara lain: tingkat outcome yang diukur, tingkat kesulitan mencapai target, besaran gap baseline-target, kompleksitas variabel pembentuk formula, kebutuhan integrasi dan validitas data, tingkat koordinasi lintas sektor, pengaruh faktor eksternal, tingkat manfaat langsung bagi masyarakat, tingkat transformasi output menuju outcome, tingkat akuntabilitas, ketepatan metodologi pengukuran, konsistensi dengan arah kebijakan strategis, serta kebutuhan inovasi dalam pencapaian target.

Dimensi-dimensi tersebut diringkas menjadi Indeks Tingkat Tantangan (Challenge Index) dengan skala 1-5 pada delapan komponen berbobot, sehingga perbandingan antar-periode Renstra dapat dilakukan secara terukur dan konsisten, bukan berdasarkan penilaian subjektif semata.

III. Ringkasan Perbandingan Utama

Tabel berikut merangkum perubahan pokok pada setiap level indikator antara kedua periode Renstra.

Level	IKU Renstra 2021-2026	IKU Renstra 2025-2029	Sifat Perubahan
Tujuan (T)	Indeks Infrastruktur Wilayah (kondisi fisik, OUTPUT) Baseline 65,00 → Target 71,05 (gap 9,3%)	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur/IKLI (kepuasan masyarakat, OUTCOME) Baseline 52,68 → Target 64,76 (gap 22,9%)	Gap naik 2,5x lipat; level bergeser output→outcome; metodologi mengacu PermenpanRB No.14/2017

Level	IKU Renstra 2021-2026	IKU Renstra 2025-2029	Sifat Perubahan
Sasaran S1	Indeks Konektivitas: 2 variabel Baseline–Target 56,35–69,46	Indeks Infrastruktur: 6 variabel (+air minum, sanitasi, transportasi, listrik, internet) Baseline–Target 56,35–69,46	Kompleksitas & koordinasi lintas sektor naik signifikan (skor 2,0→3,7);
Sasaran S2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 100 → 100 (gap 0%)	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 100 → 100 (gap 0%)	Angka tetap 100%; tantangan bertumpu pada kompleksitas substantif penilaian KKPR (Bagian V.3)
Sasaran S3 (baru)	Tidak ada padanan	Nilai Implementasi SAKIP (dinilai Inspektorat) Baseline 72 → Target 80,12 (gap 11,3%)	Penambahan indikator akuntabilitas yang dinilai pihak eksternal independen

IV. Bukti Kuantitatif Peningkatan Tantangan

A. Gap Baseline–Target

Pada level Tujuan, gap relatif antara baseline dan target meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 9,3% menjadi 22,9%. Ini merupakan bukti kuantitatif paling kuat dan paling defensibel bahwa IKU Tujuan pada Renstra baru lebih menantang dibanding periode sebelumnya.

B. Skor Kompleksitas Formula (Skala 1–5)

Indikator	Jumlah Variabel	Sumber Data	Rata-rata Skor Kompleksitas
I.T.1 Lama (Indeks Infrastruktur Wilayah)	4–5 variabel	1–2 laporan internal	2,6
I.T.1 Baru (IKLI)	14 unsur SKM	Survei primer terstruktur	3,7
I.S.1 Lama (Indeks Konektivitas)	2 variabel	1 laporan internal	2,0
I.S.1 Baru (Indeks Infrastruktur)	6 variabel, lintas sektor	Multi-sumber (PLN, penyedia internet, PDAM)	3,7

C. Indeks Tingkat Tantangan (Challenge Index)

Level	Renstra 2021-2026	Renstra 2025-2029	Perubahan
Tujuan (T)	2,40	4,00	+1,60 poin (+67%)
Sasaran S1	2,80	3,85	+1,05 poin (+38%)
Sasaran S2	1,20	1,20	Tidak berubah

V. Analisis per Level Indikator

1. Level Tujuan — Jelas Lebih Menantang

Perubahan dari Indeks Infrastruktur Wilayah menjadi Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan perubahan substantif penuh: nama, formula, sumber data, dan baseline

seluruhnya berubah. IKLI diukur melalui survei kepuasan masyarakat mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, sehingga keberhasilan kinerja DPUPR kini ditentukan oleh persepsi nyata masyarakat, bukan sekadar kondisi fisik aset yang dilaporkan secara internal. Gap baseline-target naik dari 9,3% menjadi 22,9%, dan kontrolabilitas menurun karena capaian dipengaruhi ekspektasi masyarakat yang terus meningkat — sebuah karakteristik indikator outcome yang secara inheren lebih menantang dibanding indikator output.

2. Sasaran S1 — Cenderung Lebih Menantang

Formula Indeks Infrastruktur S1 diperluas dari 2 variabel (kemantapan jalan, konektivitas) menjadi 6 variabel (menambah air minum, sanitasi, transportasi, listrik, dan internet), menuntut koordinasi dan integrasi data lintas sektor yang sebelumnya tidak diperlukan, termasuk dari PLN, penyedia telekomunikasi, dan PDAM. Skor kompleksitas naik dari 2,0 menjadi 3,7. Namun demikian, secara jujur perlu disampaikan bahwa angka baseline dan target akhir S1 belum berubah (identik 56,35→69,46), sehingga bukti “lebih menantang” pada indikator ini bertumpu pada kompleksitas pencapaian, bukan pada kenaikan besaran target.

3. Sasaran S2 — Menantang secara Substantif, Bukan Sekadar Administratif

Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang memang tidak mengalami perubahan formula, baseline, maupun target (100% → 100%) dari Renstra sebelumnya. Namun, konsistensi angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai indikator yang mudah atau sekadar administratif. Target 100% adalah target tanpa toleransi: setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang dinilai harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang, sehingga satu penilaian yang keliru atau tidak terdokumentasi dengan baik membuat capaian tidak lagi 100%. Mempertahankan capaian penuh di tengah dinamika regulasi, keterbatasan instrumen tata ruang, dan beragamnya kepentingan atas ruang merupakan tantangan yang nyata.

Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Penilaian dilakukan terhadap kesesuaian lokasi dan kegiatan dengan rencana tata ruang, dan dalam praktiknya menuntut penelaahan atas sepuluh isu teknis dan regulatif sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Isu-isu tersebut mencakup keberlakuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah, pembahasan lintas sektor melalui Forum Penataan Ruang (FPR), pemeriksaan lapangan, pengendalian alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), rekonsiliasi data spasial, serta pengendalian setelah persetujuan diterbitkan.

Tabel 1. Kompleksitas substantif dalam penilaian KKPR

No.	Isu teknis dan regulatif	Sifat Kompleksitas Penerbitan KKPR pada periode Renstra 2025-2029	Bukti yang perlu disiapkan DPUPR
1	Status dan keberlakuan RTRW	Penilaian harus menggunakan dokumen tata ruang yang sah, berlaku, dan relevan dengan lokasi. Ketidakjelasan status revisi atau dokumen pengganti dapat menambah kebutuhan klarifikasi.	Perda RTRW, dokumen revisi, status persetujuan substansi, serta korespondensi dengan pemerintah provinsi atau pusat jika ada.

No.	Isu teknis dan regulatif	Sifat Komplexitas Penerbitan KKPR pada periode Renstra 2025-2029	Bukti yang perlu disiapkan DPUPR
2	Belum tersedianya RDTR di seluruh wilayah	Belum tersedianya RDTR untuk suatu lokasi dapat menyebabkan penilaian tidak dapat menggunakan pengaturan zonasi terperinci sebagaimana tersedia pada wilayah yang telah memiliki RDTR.	Peta cakupan RDTR, daftar wilayah yang belum tercakup, dan mekanisme penilaian KKPR yang diterapkan.
3	Pembahasan melalui FPR	Kasus yang memerlukan pertimbangan lintas sektor menuntut penyampaian materi, pemeriksaan dokumen, penyelarasan pendapat, dan dokumentasi rekomendasi.	Undangan, daftar hadir, bahan rapat, notula, peta lokasi, rekomendasi, dan tindak lanjut.
4	Kunjungan lapangan	Kondisi aktual dapat berbeda dari data peta atau informasi permohonan, sehingga diperlukan pemeriksaan faktual untuk kasus yang memerlukannya.	Surat tugas, dokumentasi foto berkoordinat jika tersedia, berita acara, dan hasil verifikasi.
5	LSD	Tumpang tindih lokasi dengan peta LSD memerlukan pemeriksaan spasial dan penerapan ketentuan pengendalian alih fungsi lahan sawah yang berlaku.	Peta overlay, hasil klarifikasi instansi berwenang, dan dokumen penelaahan.
6	LP2B dan lahan pertanian	Perlindungan lahan pertanian pangan memerlukan pertimbangan keberlanjutan fungsi lahan serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.	Peta LP2B jika telah ditetapkan, dokumen tata ruang, dan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pertanian.
7	Ketidaksesuaian data spasial	Perbedaan koordinat, luas, batas persil, dan peta sektoral berpotensi menghasilkan kesimpulan yang keliru apabila tidak direkonsiliasi.	Data koordinat, peta kerja, catatan koreksi, dan hasil rekonsiliasi.
8	Kawasan lindung dan pembatas sektoral lainnya	Lokasi dapat beririsan dengan sempadan, kawasan rawan bencana, kawasan strategis, atau pembatas lain yang memerlukan penelaahan.	Hasil overlay dan dasar regulasi masing-masing pembatas.
9	Konflik kepentingan pemanfaatan ruang	Permohonan dapat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, pertanian, investasi, lingkungan, dan infrastruktur.	Notula konsultasi, masukan pemangku kepentingan, dan dokumentasi penyelesaian isu.
10	Pengendalian setelah penerbitan	Kesesuaian pada tahap persetujuan tidak otomatis membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap sesuai di lapangan.	Data pemantauan, hasil pengawasan, dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang tidak ditentukan oleh satu langkah verifikasi, melainkan oleh rangkaian penelaahan spasial, hukum, dan lintas sektor yang masing-masing meninggalkan jejak bukti. Kolom ketiga sekaligus menjadi daftar bukti yang perlu disiapkan DPUPR apabila Inspektorat meminta pertanggungjawaban atas capaian indikator ini. Argumentasi tersebut bertumpu pada kerangka regulasi yang dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Regulasi yang mendasari argumentasi DPUPR

No.	Regulasi	Relevansi terhadap argumentasi DPUPR
1	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah	Landasan penyelenggaraan penataan ruang, kesesuaian pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perlu dibaca bersama perubahan peraturan yang berlaku.
2	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kerangka penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan KKPR, perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3	Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Rujukan teknis pelaksanaan KKPR dan mekanisme penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
4	Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2022	Dasar koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan Forum Penataan Ruang. Regulasi ini menjelaskan keberadaan forum sebagai bagian dari penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif.
5	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Relevan untuk menjelaskan bahwa keberadaan lahan sawah yang dilindungi memerlukan perhatian khusus dalam pengendalian alih fungsi lahan.
6	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dasar perlindungan LP2B dan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan lahan pertanian pangan dalam proses penataan ruang.
7	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011–2031	Tercatat berstatus berlaku pada JDIH BPK. Menjadi dasar penilaian kesesuaian saat ini; kompleksitas muncul dari status revisi atau dokumen pengganti RTRW dan belum tersedianya RDTR di seluruh wilayah, bukan dari ketiadaan RTRW.

Sumber rujukan: JDIH BPK dan JDIH Kementerian ATR/BPN.

Catatan atas status RTRW. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011–2031 tercatat berstatus berlaku pada JDIH BPK. Oleh karena itu, argumentasi DPUPR tidak menyatakan bahwa Lombok Tengah tidak memiliki RTRW yang sah. Yang dikemukakan adalah bahwa status revisi atau dokumen pengganti RTRW, serta belum tersedianya RDTR di seluruh wilayah, menambah kebutuhan klarifikasi dan kehati-hatian dalam setiap penilaian KKPR.

Catatan metodologis. Angka target S2 tidak berubah, sehingga bukti tantangan indikator ini bertumpu pada kompleksitas substantif penilaian, bukan pada kenaikan angka target. Kekuatan argumen ini karena itu sangat bergantung pada kelengkapan bukti pada Tabel 1, dan DPUPR perlu menyusun kertas kerja penilaian KKPR yang memuat bukti-bukti tersebut.

4. Sasaran S3 — Penambahan Dimensi Akuntabilitas Baru

Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator baru yang tidak memiliki padanan pada Renstra sebelumnya, dengan baseline 72 menuju target 80,12 (gap 11,3%). Indikator ini dinilai langsung oleh Inspektorat sebagai pihak eksternal independen, sehingga memperkuat cakupan akuntabilitas kinerja DPUPR di luar mekanisme pelaporan mandiri (self-assessment).

VI. Keunggulan IKU Renstra 2025-2029 secara Menyeluruh

- Orientasi outcome yang lebih kuat: pergeseran pengukuran dari “berapa banyak dibangun” menjadi “seberapa baik manfaatnya dirasakan masyarakat” pada level Tujuan.
- Metodologi pengukuran yang lebih valid dan terstandar secara nasional (SKM PermenpanRB No.14/2017), sehingga dapat dibandingkan antar-OPD/daerah.
- Sumber data yang lebih beragam: menggabungkan data administratif, survei primer, dan penilaian eksternal oleh Inspektorat.
- Cakupan akuntabilitas yang lebih komprehensif melalui penambahan Sasaran S3 (Nilai SAKIP).
- Cascading indikator Sasaran S1 yang lebih selaras dengan kualitas hidup masyarakat (menambah listrik, internet, air minum, sanitasi, transportasi).
- Sistem peringatan dini (early warning): siklus survei IKLI memberi sinyal penurunan kepuasan yang tidak tertangkap oleh indeks kondisi fisik.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan bukti kuantitatif dan kualitatif di atas, IKU Renstra 2025-2029 secara keseluruhan lebih baik dan lebih menantang dibanding IKU Renstra 2021-2026, dengan tingkat peningkatan yang bervariasi per level indikator:

Level Indikator	Kesimpulan	Dasar Utama
Tujuan (I.T.1 IKLI)	Jelas lebih menantang	Gap naik 9,3%→22,9%; output→outcome; metodologi nasional baku; kontrolabilitas menurun
Sasaran S1 (Indeks Infrastruktur)	Cenderung lebih menantang	Kompleksitas & koordinasi lintas sektor naik nyata (skor 2,0→3,7); target numerik perlu dikalibrasi ulang
Sasaran S2 (Kesesuaian Ruang)	Sangat menantang secara substantif (angka target tetap 100%)	Target 100% tanpa toleransi; penilaian KKPR melibatkan sepuluh isu teknis-regulatif (Tabel 1, Bagian V.3); angka target tidak berubah
Sasaran S3 (Nilai SAKIP)	Penambahan akuntabilitas baru	Indikator baru, dinilai eksternal oleh Inspektorat, gap 11,3%

Dengan demikian, klaim peningkatan tantangan IKU disampaikan secara berjenjang dan didukung data, sehingga defensible di hadapan Inspektorat, dan sekaligus menunjukkan itikad baik DPUPR untuk terus menyempurnakan kualitas IKU pada periode mendatang.

VIII. Rekomendasi Tindak Lanjut

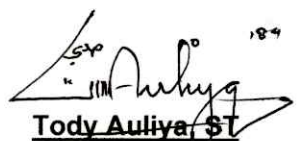
- Melakukan kalibrasi ulang target numerik Sasaran S1 agar konsisten dengan perluasan formula dari 2 menjadi 6 variabel.

- Menyusun kertas kerja penilaian KKPR untuk Sasaran S2 yang memuat bukti pendukung pada Tabel 1 (peta overlay, notula FPR, berita acara kunjungan lapangan, rekonsiliasi data spasial, dan data pengendalian setelah penerbitan) sebagai bahan pemeriksaan Inspektorat.
 - Menyiapkan dokumen metodologi dan instrumen survei IKLI (jumlah responden, teknik sampling, 14 unsur SKM) sebagai bahan pemeriksaan Inspektorat.
 - Menyiapkan data historis realisasi IKU periode Renstra 2021-2025 untuk memperkuat analisis tren pada pemeriksaan berikutnya.
 - Menyusun kertas kerja perhitungan Indeks Infrastruktur S1 baru yang menjelaskan bobot/kontribusi tiap variabel serta sumber data masing-masing pihak (PLN, penyedia telekomunikasi, PDAM).
-
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala sesuai Jadwal Evaluasi Tahunan Monitoring dan Evaluasi Internal Kinerja DPUPR, guna memastikan capaian IKU baru terpantau konsisten setiap bulan, triwulan, dan semester.

Mengetahui,


Ir. Lalu Rahadian, M.Si
NIP. 196712311992031117

Penyusun Laporan,


Tody Auliya, ST
NIP. 19840609201001016

LAMPIRAN

A. Kerangka Penilaian

Kerangka penilaian menggunakan 14 dimensi berikut:

1. Tingkat outcome yang diukur — makin dekat ke manfaat akhir bagi masyarakat (outcome/impact), makin menantang dibanding sekadar output.
2. Tingkat kesulitan mencapai target — seberapa besar upaya dan sumber daya yang dibutuhkan relatif terhadap kapasitas OPD.
3. Penentuan target — seberapa tinggi target dibanding baseline dan dibanding kapasitas historis.
4. Besarnya perubahan yang harus dicapai — gap absolut dan relatif antara baseline dan target.
5. Kompleksitas variabel pembentuk — jumlah dan keragaman variabel dalam formula.
6. Kebutuhan kualitas dan integrasi data — seberapa banyak sumber data harus diintegrasikan dan seberapa tinggi tuntutan validitasnya.
7. Tingkat koordinasi lintas bidang/sektor — apakah pencapaian bergantung pada pihak/instansi lain di luar kendali langsung OPD.
8. Besarnya pengaruh faktor eksternal — makin besar pengaruh faktor di luar kendali OPD, makin menantang.
9. Tingkat manfaat bagi masyarakat — seberapa langsung indikator mencerminkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
10. Tingkat transformasi dari output menuju outcome — pergeseran fokus pengukuran dari “berapa banyak dibangun” menjadi “seberapa baik manfaatnya”.
11. Tingkat akuntabilitas perangkat daerah — seberapa besar indikator membebankan tanggung jawab hasil, bukan sekadar kegiatan, kepada OPD.
12. Tingkat ketepatan pengukuran — metodologi pengukuran yang lebih valid dan terstandar (mis. mengacu regulasi resmi).
13. Konsistensi dengan tujuan dan sasaran strategis — keselarasan indikator dengan arah kebijakan yang lebih tinggi.
14. Kebutuhan inovasi untuk mencapai target — apakah target hanya bisa dicapai lewat cara-cara baru, bukan aktivitas rutin.

B. Perbandingan Utama IKU Renstra 2021-2026 - IKU Renstra 2025-2029

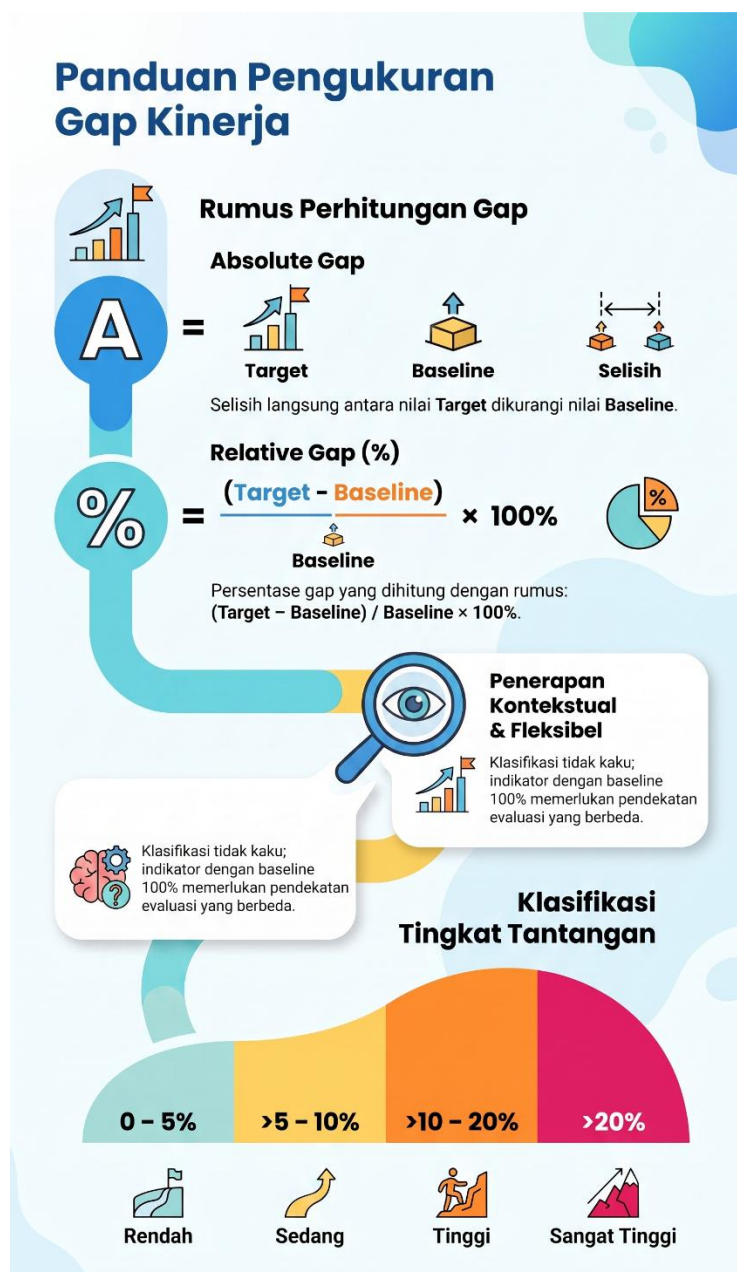
No	Aspek	IKU Resntra 2021-2026	IKU Renstra 2025-2029	Perubahan	Pembaharuan	Bukti
1	Level	Tujuan (T1): 2 indikator komposit (I.T.1 Indeks Infrastruktur Wilayah; I.T.2 Indeks Penataan Ruang)	Tujuan (T1): 1 indikator (I.T.1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur/IKLI)	Penyederhanaan dari 2 menjadi 1 indikator tujuan; I.T.2 tidak dilanjutkan sebagai indikator tujuan (unsur penataan ruang tetap ada di S2)	Campuran — lihat butir 2 & 3	Dok. Lama hlm.1 vs Dok. Baru hlm.1
2	Output vs Outcome (Tujuan)	I.T.1 = indeks komposit kondisi infrastruktur (jalan, irigasi, air minum, sanitasi, kumuh) — dominan OUTPUT	IKLI = Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu PermenpanRB No.14/2017 — OUTCOME (persepsi layanan)	Pergeseran level dari kondisi fisik infrastruktur ke kepuasan/ persepsi masyarakat	YA — Baru lebih menantang	Formula & sumber data (Laporan Survei Kepuasan)
3	Formula (Tujuan)	Komposit administratif 5 variabel (data internal OPD)	$IKLI = \frac{\sum(n_i \times w_i)}{\sum w_i}$ — survei primer 14 unsur SKM	Dari data administratif ke survei primer berjenjang	YA — metodologi lebih ketat, rentan penilaian subjektif masyarakat	Rumus tercantum di kedua dokumen
4	Target & Baseline (Tujuan I.T.1)	Baseline 65.00 → Target akhir 71.05 (gap 6.05 / 9.3%)	Baseline 52.68 → Target akhir 64.76 (gap 12.08 / 22.9%)	Gap relatif naik dari 9.3% menjadi 22.9% (+13.6 poin persentase)	YA — gap jauh lebih besar	Perhitungan pada Bagian D
5	Indikator hilang (Tujuan)	I.T.2 Indeks Penataan Ruang: Baseline 13.00 → Target 100.00 (gap ekstrem +669%)	Tidak ada padanan di level Tujuan	Indikator dengan gap paling ekstrem justru DIHENTIKAN di level Tujuan (bergeser ke S2 sebagai Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang)	TIDAK — ini justru mengurangi cakupan tantangan di level Tujuan; perlu penjelasan	Bandingkan jumlah indikator Tujuan: 2 (lama) vs 1 (baru)
6	Sasaran S1	Indeks Konektivitas: 2 variabel (kemantapan jalan, konektivitas 4 simpul). Baseline 56.35 → Target 69.46	Indeks Infrastruktur: 6 variabel (jalan, air minum, sanitasi, transportasi, listrik, internet). Baseline 56.35 → Target 69.46	ANGKA TARGET IDENTIK, namun cakupan variabel bertambah dari 2 menjadi 6 (lintas sektor: PLN, penyedia internet, PDAM)	CENDERUNG — kompleksitas & ketergantungan eksternal naik, TETAPI target numerik tidak dinaikkan (perlu klarifikasi)	Baseline & target sama persis di kedua dokumen
7	Sasaran S2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang: 100 → 100 (gap 0%)	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang: 100 → 100 (gap 0%)	TIDAK ADA PERUBAHAN sama sekali — redaksi, formula, dan target identik	TIDAK — indikator ini tidak lebih menantang karena tidak berubah dan tanpa ambisi (sudah 100% sejak awal)	Kedua dokumen mencantumkan angka 100 di semua tahun
8	Sasaran S3 (baru)	Tidak ada padanan	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (penilaian Inspektorat). Baseline 72 → Target 80.12 (gap 8.12/11.3%)	Penambahan indikator baru yang dinilai pihak EKSTERNAL (Inspektorat), bukan self-assessment OPD	YA (sebagai penambahan cakupan akuntabilitas) — namun bersifat proses/internal, bukan outcome layanan publik	Baru muncul di dokumen Renstra 2026–2030
9	Sumber data	Data administratif/laporan kinerja internal OPD (mayoritas)	Menggabungkan data administratif DAN survei primer (SKM) serta penilaian eksternal	Sumber data lebih beragam & sebagian berada di luar kendali langsung OPD	YA — ketergantungan pada pihak eksternal meningkat	Kolom “Sumber Data” di kedua dokumen

No	Aspek	IKU Resntra 2021-2026	IKU Renstra 2025-2029	Perubahan	Pembaharuan	Bukti
			(SAKIP oleh Inspektorat)		kontrolabilitas menurun	
10	Controllability	Tinggi — dominan aktivitas fisik yang dikerjakan langsung OPD (bina marga, irigasi)	Menurun — dipengaruhi persepsi masyarakat (IKLI), sektor lain (listrik/internet), dan penilaian Inspektorat (SAKIP)	Faktor eksternal yang harus dikelola bertambah	YA — mengelola faktor di luar kendali langsung lebih sulit	Uraian formula & penanggung jawab
11	Risiko pencapaian	Risiko relatif rendah — target lama dekat dengan baseline	Risiko lebih tinggi — IKLI bergantung pada persepsi yang bisa dipengaruhi ekspektasi masyarakat yang terus naik	Risiko kegagalan capaian target meningkat	YA	Analisis gap Bagian D

C. Uji Tantangan dan Kebutuhan Pencapaian Target IKU

No	Pertanyaan Uji	Jawaban	Alasan Berbasis Data
1	Target IKU baru membutuhkan peningkatan kinerja lebih besar?	YA (di level Tujuan) / TIDAK BERUBAH (di S1 & S2)	Gap relatif Tujuan naik dari 9.3% menjadi 22.9%. Namun target S1 dan S2 secara angka identik dengan versi lama.
2	Baseline lebih rendah terhadap target?	YA, untuk I.T.1	Baseline IKLI (52.68) secara proporsional lebih jauh dari target akhir (64.76) dibanding baseline lama (65.00) terhadap target lamanya (71.05).
3	Gap baseline-target lebih besar?	YA untuk Tujuan; TIDAK untuk S1 & S2 (identik); N/A untuk S3 (indikator baru)	Lihat perhitungan Bagian D.
4	Target membutuhkan perubahan struktural?	YA, untuk IKLI	Meningkatkan kepuasan masyarakat menuntut perbaikan proses pelayanan, respons pengaduan, dan komunikasi publik — bukan hanya menambah output fisik.
5	Target tidak dapat dicapai hanya dengan aktivitas rutin?	YA, untuk IKLI dan S1 baru; TIDAK untuk S2	IKLI dipengaruhi ekspektasi masyarakat yang terus meningkat, sehingga aktivitas rutin belum tentu menaikkan skor. Indeks Infrastruktur S1 baru menuntut koordinasi lintas sektor yang belum tentu tercakup rutinitas OPD PU.
6	Mebutuhkan inovasi?	YA, untuk IKLI dan S1 baru	Diperlukan inovasi pada manajemen pengaduan, transparansi informasi layanan, serta integrasi data lintas sektor (listrik, internet, air minum) yang sebelumnya tidak menjadi bagian formula S1.
7	Mebutuhkan koordinasi lintas bidang?	YA, meningkat pada S1 baru dan S3	S1 baru melibatkan data dari sektor kelistrikan dan telekomunikasi/internet yang berada di luar kewenangan langsung DPUPR. S3 melibatkan penilaian Inspektorat.
8	Mebutuhkan peningkatan kualitas layanan?	YA, untuk IKLI	IKLI secara eksplisit mengukur kepuasan atas kualitas layanan, bukan sekadar kuantitas output.
9	Terdapat faktor eksternal yang harus dikelola?	YA	Persepsi masyarakat (IKLI), ketersediaan layanan listrik/internet oleh pihak ketiga (S1), dan penilaian independen Inspektorat (S3) merupakan faktor di luar kendali penuh OPD.
10	Mebutuhkan konsistensi kinerja beberapa tahun?	YA, untuk seluruh indikator	Seluruh indikator memiliki target bertahap tahunan 2026–2030 yang harus dijaga trennya naik secara konsisten, bukan sekali capai.

D. Analisis Gap Baseline–Target



Indikator	Level	Baseline 2025	Target Akhir 2030	Gap Absolut	Gap Relatif	Klasifikasi Tantangan
I.T.1 (Lama) Indeks Infrastruktur Wilayah	Tujuan	65.00	71.05	6.05	9.3%	Sedang
I.T.2 (Lama) Indeks Penataan Ruang	Tujuan	13.00	100.00	87.00	669.2%	Sangat Tinggi (namun dihentikan di Renstra baru)
I.T.1 (Baru) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Tujuan	52.68	64.76	12.08	22.9%	Sangat Tinggi
I.S.1 (Lama) Indeks Konektivitas	Sasaran	56.35	69.46	13.11	23.3%	Sangat Tinggi
I.S.1 (Baru) Indeks Infrastruktur	Sasaran	56.35	69.46	13.11	23.3% (identik dgn lama)	Sangat Tinggi (angka tidak berubah, cakupan variabel bertambah)
I.S.2 (Lama & Baru) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Sasaran	100	100	0	0%	Rendah / Tanpa ambisi (tidak berubah)

Indikator	Level	Baseline 2025	Target Akhir 2030	Gap Absolut	Gap Relatif	Klasifikasi Tantangan
I.S.3 (Baru) Nilai Implementasi SAKIP	Sasaran	72	80.12	8.12	11.3%	Tinggi

Temuan kunci Bagian D:

- Di level Tujuan, gap relatif naik lebih dari dua kali lipat (9.3% → 22.9%) — bukti kuantitatif paling kuat bahwa IKU Tujuan baru lebih menantang.
- Di level Sasaran S1, gap relatif TIDAK berubah sama sekali karena baseline dan target akhir persis sama (56.35 → 69.46) meskipun jumlah variabel formulanya bertambah dari 2 menjadi 6. Ini berarti klaim “lebih menantang” pada S1 tidak bisa didasarkan pada besaran target, melainkan hanya pada kompleksitas pencapaian (dibahas Bagian F).
- Sasaran S2 sama sekali tidak berubah dan tidak memiliki ambisi (target dari awal sudah 100% dan tetap 100%). Ini adalah kelemahan yang harus diakui secara terbuka, bukan diklaim sebagai peningkatan.
- Indikator I.T.2 (Lama) memiliki gap relatif paling ekstrem (669%) namun dihentikan di Renstra baru. Perlu dijelaskan kepada auditor bahwa substansi penataan ruang tidak hilang, melainkan dilanjutkan pada S.2 (Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) dengan pendekatan pengukuran yang lebih realistis (bukan target 100% yang secara metodologis janggal jika baseline hanya 13%).

E. Analisis Rantai Outcome (Input → Proses → Output → Outcome → Impact)

Indikator	Level dalam Rantai	Penjelasan	Manfaat Masyarakat
I.T.1 Lama — Indeks Infrastruktur Wilayah	OUTPUT (kondisi fisik agregat)	Mengukur kondisi fisik jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan penurunan kumuh — seberapa banyak/baik infrastruktur terbangun.	Tidak langsung — asumsi bahwa kondisi fisik baik = manfaat baik, tanpa mengonfirmasi persepsi warga.
I.T.1 Baru — IKLI	OUTCOME (persepsi layanan)	Mengukur kepuasan masyarakat langsung melalui survei terstandar (SKM PermenpanRB 14/2017) atas layanan infrastruktur yang diterima.	Langsung — mengonfirmasi apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat, bukan hanya bahwa proyek selesai dibangun.
I.T.2 Lama — Indeks Penataan Ruang	PROSES/OUTPUT	Mengukur kelengkapan dokumen rencana, kepatuhan KKPR, dan pengendalian — bersifat administratif-prosedural.	Tidak langsung — kepatuhan prosedur belum tentu dirasakan warga sebagai manfaat.
I.S.1 Lama/Baru — Indeks Konektivitas/Infrastruktur	OUTPUT (dengan sedikit unsur outcome pada S1 Baru)	Mengukur cakupan/kualitas infrastruktur fisik dan aksesibilitas layanan dasar (air minum, listrik, internet pada versi baru).	Sedang — komposit S1 baru memasukkan akses listrik dan internet yang lebih mencerminkan kualitas hidup, namun tetap berbasis cakupan (coverage), bukan kepuasan.

Indikator	Level dalam Rantai	Penjelasan	Manfaat Masyarakat
I.S.2 — Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	PROSES (kepatuhan)	Mengukur kepatuhan penerbitan izin terhadap RTR.	Tidak langsung.
I.S.3 Baru — Nilai SAKIP	PROSES/INPUT (tata kelola internal)	Mengukur kualitas sistem akuntabilitas kinerja internal OPD, dinilai pihak eksternal (Inspektorat).	Tidak langsung terhadap warga, namun penting bagi akuntabilitas pemerintahan.

Kesimpulan Bagian E: Terjadi peningkatan level yang jelas HANYA pada indikator Tujuan (I.T.1), dari output menuju outcome. Pada level Sasaran, pergeseran output menjadi outcome belum terjadi secara tegas — S1 tetap dominan output/coverage, S2 tetap proses kepatuhan, dan S3 adalah indikator proses tata kelola internal. Ini penting disampaikan secara jujur kepada auditor: peningkatan level outcome terjadi di puncak (Tujuan), namun belum merata ke seluruh Sasaran.

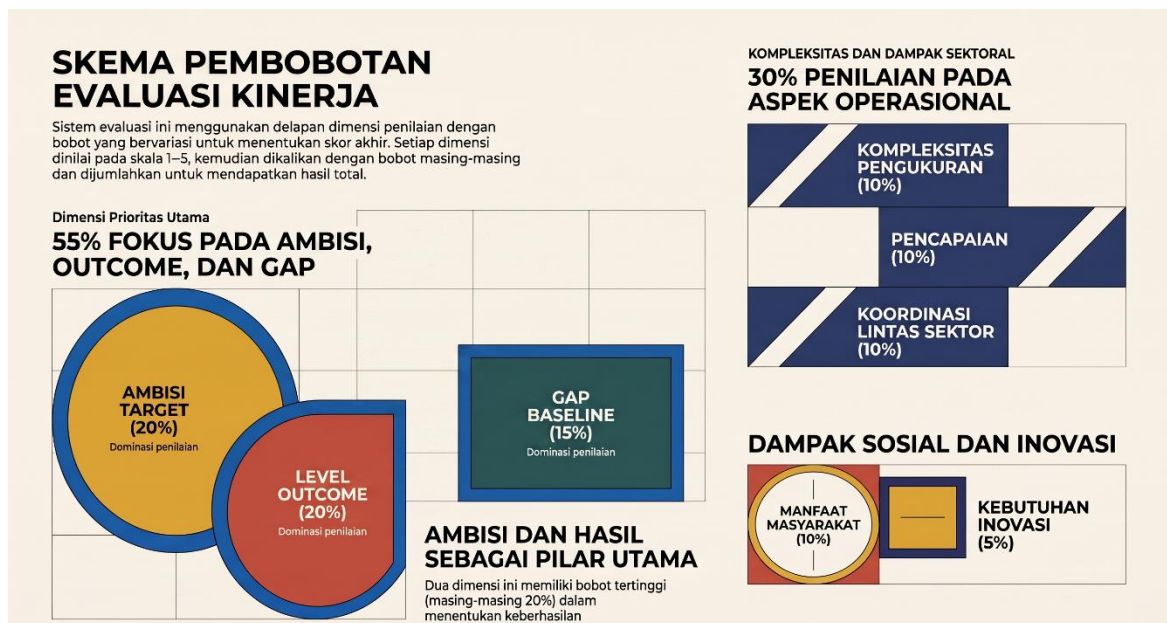
F. Analisis Kompleksitas (Skor 1–5)

Kriteria	I.T.1 Lama	I.T.1 Baru (IKLI)	I.S.1 Lama	I.S.1 Baru
1. Jumlah variabel	4 (skor 3) jalan, irigasi, air minum, sanitasi + kumuh	14 unsur SKM (skor 4)	2 (skor 2)	6 (skor 4)
2. Jumlah sumber data	1–2 laporan internal (skor 2)	1 survei primer terstruktur (skor 4)	1 laporan (skor 2)	Multi-sumber lintas sektor (skor 4)
3. Unit/bidang terlibat	2–3 bidang internal DPUPR (skor 3)	Seluruh bidang layanan publik DPUPR (skor 4)	1–2 bidang (skor 2)	4–5 bidang/sektor (skor 4)
4. Ketergantungan lintas sektor	Rendah (skor 2)	Sedang (skor 3)	Rendah (skor 2)	Tinggi — PLN, penyedia internet, PDAM (skor 4)
5. Ketergantungan faktor eksternal	Rendah (skor 2)	Tinggi — persepsi masyarakat (skor 4)	Rendah (skor 2)	Tinggi (skor 4)
6. Frekuensi pengumpulan data	Tahunan (skor 2)	Tahunan, perlu desain sampel survei (skor 3)	Tahunan (skor 2)	Tahunan, multi-sumber (skor 3)
7. Kompleksitas formula	Sedang (skor 3)	Sedang–tinggi, pembobotan 14 unsur (skor 4)	Sederhana (skor 2)	Kompleks, 6 komponen (skor 4)
8. Kebutuhan validasi	Sedang (skor 3)	Tinggi — validitas & reliabilitas survei (skor 4)	Rendah (skor 2)	Sedang–tinggi (skor 3)
9. Kebutuhan integrasi data	Sedang (skor 3)	Sedang (skor 3)	Rendah (skor 2)	Tinggi (skor 4)
10. Kesulitan verifikasi	Sedang (skor 3)	Tinggi — audit metodologi survei (skor 4)	Rendah (skor 2)	Sedang–tinggi (skor 3)
Rata-rata skor	2.6	3.7	2.0	3.7

Kesimpulan Bagian F: Baik pada level Tujuan maupun Sasaran S1, kompleksitas pengukuran dan pencapaian IKU baru meningkat signifikan. Namun sesuai catatan penting: kompleksitas formula BUKAN otomatis berarti lebih menantang secara kinerja — kompleksitas ini relevan

sebagai bukti pendukung HANYA jika disertai bukti bahwa target/outcome yang diukur juga lebih sulit dicapai (lihat Bagian D dan E). Untuk I.T.1, kedua bukti (gap lebih besar DAN kompleksitas lebih tinggi) hadir bersamaan — argumen kuat. Untuk S1, hanya bukti kompleksitas yang meningkat, sedangkan gap target tidak berubah — argumen sedang, perlu penguatan lebih lanjut (idealnya target S1 baru dikalibrasi ulang mengikuti formula barunya).

G. Indeks Tingkat Tantangan IKU (Challenge Index)



Level	Versi	A(20%)	B(15%)	C(20%)	D(10%)	E(10%)	F(10%)	G(10%)	H(5%)	Challenge Index
Tujuan (T)	Lama	2	2	2	3	3	3	3	2	2.40
Tujuan (T)	Baru	4	4	4	4	4	3	5	4	4.00
Sasaran S1	Lama	4	4	2	2	2	2	3	2	2.80
Sasaran S1	Baru	4	4	3	4	4	5	4	3	3.85
Sasaran S2	Lama	1	1	2	1	1	1	2	1	1.20
Sasaran S2	Baru	1	1	2	1	1	1	2	1	1.20 (tidak berubah)

Interpretasi Challenge Index:

- Tujuan (T): 2.40 → 4.00 (naik +1.60 poin / +67%). Kenaikan didorong oleh ambisi target, gap yang lebih besar, level outcome yang lebih tinggi, dan manfaat masyarakat yang lebih langsung terukur. Ini adalah bukti paling kuat dan paling defensibel di hadapan Inspektorat.
- Sasaran S1: 2.80 → 3.85 (naik +1.05 poin / +38%). Kenaikan murni berasal dari kompleksitas pengukuran, kompleksitas pencapaian, dan koordinasi lintas sektor — BUKAN dari kenaikan angka target (yang identik). Auditor kemungkinan akan mempertanyakan hal ini; jawabannya harus jujur: target belum dikalibrasi ulang, dan ini menjadi catatan perbaikan (lihat Bagian O).

- Sasaran S2: 1.20 → 1.20, tidak berubah sama sekali. IKU ini TIDAK lebih menantang dan sebaiknya menjadi catatan perbaikan untuk periode berikutnya (misalnya menambah dimensi kualitas kesesuaian, bukan hanya kepatuhan administratif).

H. Keunggulan IKU Baru (Berbasis Bukti)

Dimensi Keunggulan	Bukti
1. Strategis	IKLI menempatkan kepuasan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan tertinggi (Tujuan), sejalan dengan arah reformasi birokrasi berbasis hasil.
2. Outcome	Pergeseran I.T.1 dari indeks kondisi fisik ke indeks kepuasan masyarakat — outcome sejati, bukan proksi output.
3. Pengukuran	IKLI mengacu metodologi baku nasional (PermenpanRB No.14/2017), lebih valid dan dapat dibandingkan antar-OPD/daerah dibanding indeks komposit internal yang disusun sendiri.
4. Target	Gap target Tujuan meningkat dari 9.3% menjadi 22.9%, menuntut peningkatan kinerja riil, bukan sekadar mempertahankan status quo.
5. Relevansi Masyarakat	IKLI mengukur langsung persepsi warga sebagai penerima layanan, bukan hanya kondisi aset infrastruktur.
6. Data	Penambahan sumber data primer (survei) dan data lintas sektor (listrik, internet) memperkaya basis bukti kinerja.
7. Akuntabilitas	Penambahan S3 (Nilai SAKIP oleh Inspektorat) menjadikan penilaian kinerja OPD juga diverifikasi pihak eksternal, bukan hanya self-reporting.
8. Cascading	Formula S1 baru (6 komponen: jalan, air minum, sanitasi, transportasi, listrik, internet) selaras lebih baik dengan indikator Tujuan yang berorientasi kualitas hidup/layanan dibanding S1 lama yang hanya fokus jalan.
9. Monitoring	IKLI menuntut siklus survei periodik yang memberi sinyal dini (early warning) bila kepuasan menurun, sesuatu yang tidak tertangkap indeks kondisi fisik.
10. Evaluasi	Kombinasi IKLI + Nilai SAKIP memberi gambaran evaluasi dua sisi: hasil ke masyarakat DAN tata kelola internal.
11. Pengambilan Keputusan	Data persepsi masyarakat (IKLI) memberi arah kebijakan yang lebih presisi (bidang mana yang perlu diperbaiki) dibanding indeks kondisi fisik agregat.
12. Terhadap SAKIP	Penambahan S3 secara eksplisit membuat kualitas implementasi SAKIP sendiri menjadi bagian dari sasaran strategis — memperkuat budaya kinerja berbasis hasil di internal DPUPR.

I. Apakah IKU Baru Benar-Benar Lebih Menantang? — Penilaian Akhir per Level

Level Indikator	Kategori	Alasan
Tujuan (I.T.1 IKLI)	A. Jelas lebih menantang	Gap relatif naik 2,5x lipat (9.3%→22.9%), level bergeser output→outcome, metodologi lebih ketat (survei baku nasional), controllability menurun karena bergantung persepsi masyarakat.
Sasaran S1 (Indeks Infrastruktur)	B. Cenderung lebih menantang	Kompleksitas & ketergantungan lintas sektor meningkat nyata, namun angka target TIDAK dinaikkan dari versi lama — sehingga tidak bisa dikategorikan “jelas” lebih menantang tanpa kalibrasi ulang target.
Sasaran S2 (Kesesuaian Pemanfaatan Ruang)	D. Tidak lebih menantang	Formula, baseline, dan target 100%→100% seluruhnya identik dengan versi lama. Tidak ada perubahan substansi maupun redaksi.

Level Indikator	Kategori	Alasan
Sasaran S3 (Nilai SAKIP)	Tidak dapat dibandingkan (indikator baru)	Tidak memiliki padanan di IKU lama. Sebagai indikator baru, ia menambah cakupan akuntabilitas (gap 11.3%, dinilai eksternal oleh Inspektorat) — sebuah penguatan kerangka SAKIP, bukan “peningkatan tantangan” dari indikator yang sudah ada.

J. Simulasi Uji Audit/Inspektorat (Tanya–Jawab)

No	Pertanyaan Auditor	Jawaban Berbasis Data
1	Apa yang membuat IKU baru lebih menantang?	Pada level Tujuan, target berubah dari indeks kondisi infrastruktur (baseline 65,00→target 71,05; gap 9,3%) menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat/IKLI (baseline 52,68→target 64,76; gap 22,9%) — gap lebih dari dua kali lipat, dan level pengukuran naik dari output ke outcome.
2	Mana bukti bahwa indikator ini lebih sulit dicapai?	IKLI dipengaruhi persepsi masyarakat yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali OPD, memerlukan perbaikan proses layanan bukan sekadar pembangunan fisik, dan diukur melalui survei baku (PermenpanRB No.14/2017) yang menuntut validitas metodologis.
3	Apa perbedaan indikator lama dan baru?	Lama mengukur kondisi fisik infrastruktur secara komposit administratif; baru mengukur kepuasan masyarakat melalui survei primer. Di level Sasaran, S1 memperluas cakupan dari 2 variabel (jalan, konektivitas) menjadi 6 variabel (menambah air minum, sanitasi, listrik, internet).
4	Mengapa indikator lama diganti?	Indikator lama (indeks kondisi infrastruktur) mencerminkan sisi penyedia (berapa banyak/baik infrastruktur dibangun), belum tentu mencerminkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pergantian ke IKLI menyelaraskan pengukuran dengan prinsip akuntabilitas berbasis hasil (outcome).
5	Apakah hanya mengganti redaksi?	Tidak untuk Tujuan (I.T.1) — perubahan formula, sumber data, dan level outcome bersifat substantif. NAMUN untuk Sasaran S2, perubahan memang tidak ada sama sekali (redaksi, formula, dan target identik) — hal ini diakui secara terbuka dan menjadi catatan perbaikan ke depan.
6	Apa peningkatan outcome-nya?	IKLI secara eksplisit outcome (persepsi manfaat), sedangkan indikator lama adalah output (kondisi fisik). Ini adalah bentuk transformasi output→outcome yang paling jelas dalam dokumen ini.
7	Apakah targetnya benar-benar lebih tinggi?	Untuk Tujuan: ya, gap relatif naik dari 9,3% menjadi 22,9%. Untuk Sasaran S1: target akhir secara nominal sama (69,46) meskipun cakupan variabel bertambah — ini akan dijelaskan apa adanya, bukan diklaim sebagai kenaikan target.
8	Apakah indikator baru berada dalam kendali perangkat daerah?	Sebagian menurun kontrolabilitasnya secara sengaja — ini justru memperkuat akuntabilitas: IKLI dipengaruhi kualitas layanan riil yang dirasakan masyarakat (bukan hanya laporan internal), dan Nilai SAKIP dinilai oleh Inspektorat sebagai pihak eksternal independen.
9	Apa manfaatnya bagi masyarakat?	IKLI mengukur langsung kepuasan masyarakat atas layanan infrastruktur yang diterima, sehingga hasil pengukuran secara langsung merepresentasikan manfaat yang dirasakan, bukan proksi tidak langsung seperti indeks kondisi fisik.
10	Bagaimana indikator ini diverifikasi?	IKLI melalui Laporan Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur mengikuti metodologi SKM PermenpanRB No.14/2017; Nilai SAKIP melalui Laporan Penilaian SAKIP DPUPR oleh Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah.
11	Apa sumber datanya?	Tercantum eksplisit pada kolom Sumber Data di dokumen Renstra: Laporan Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur (I.T.1), Laporan Kinerja Infrastruktur (S.1), Laporan Kinerja Bidang Penataan Ruang (S.2), dan Laporan Penilaian SAKIP DPUPR (S.3), seluruhnya di bawah tanggung jawab Kepala Dinas.
12	Apa risiko jika target tidak tercapai?	Risiko reputasi (kepuasan masyarakat rendah berdampak pada persepsi publik terhadap pemerintah daerah secara luas), risiko administratif (nilai SAKIP rendah dapat memengaruhi opini kinerja instansi), dan risiko anggaran (indikator outcome yang tidak tercapai dapat memicu evaluasi program oleh DPRD/Bappeda).
13	Mengapa indikator ini layak menjadi IKU?	IKLI dan Nilai SAKIP memenuhi kriteria IKU yang baik: spesifik, terukur, relevan dengan tugas fungsi DPUPR, memiliki sumber data dan penanggung jawab yang jelas, serta selaras dengan tujuan/sasaran strategis Renstra 2026–2030.
14	Apa bukti bahwa IKU baru bukan sekadar perubahan nomenklatur?	Formula berubah total (dari komposit administratif menjadi indeks survei SKM baku nasional), sumber data berubah (dari laporan internal menjadi survei primer), baseline berubah signifikan (65,00→52,68 — basis pengukuran yang benar-benar berbeda, bukan re-labelling angka lama), dan gap target melebar. Pengecualian jujur: pada Sasaran S2, memang tidak ada perubahan substansi maupun nomenklatur.

K. Analisis Redaksional vs Substansi

Indikator	Klasifikasi Perubahan	Keterangan
I.T.1 (Indeks Infrastruktur Wilayah → IKLI)	Perubahan definisi + Perubahan metode pengukuran + Perubahan orientasi output→outcome + Perubahan tingkat tantangan	Perubahan substantif penuh: nama, formula, sumber data, dan baseline seluruhnya berubah dan mencerminkan pergeseran filosofi pengukuran, bukan sekadar redaksi.
I.T.2 (Indeks Penataan Ruang) → dihentikan sebagai indikator Tujuan	Perubahan cakupan/struktur Tujuan	Bukan redaksional — indikator dihentikan di level Tujuan; substansinya dilanjutkan pada S2 dengan pendekatan lebih terukur.

Indikator	Klasifikasi Perubahan	Keterangan
I.S.1 (Indeks Konektivitas → Indeks Infrastruktur)	Perubahan nomenklatur + Perubahan definisi/formula (cakupan variabel bertambah); TARGET NUMERIK TIDAK BERUBAH	Substansi formula berubah (2→6 variabel), tetapi baseline dan target akhir dipertahankan sama persis — mengindikasikan target belum dikalibrasi ulang mengikuti formula baru. Perlu tindak lanjut.
I.S.2 (Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang)	Perubahan kosmetik (tidak ada perubahan)	Nama, formula, baseline, dan target seluruhnya identik dengan versi lama. Dinyatakan secara jujur: TIDAK ada perubahan substansi pada indikator ini.
I.S.3 (Nilai Implementasi SAKIP) — baru	Penambahan indikator baru	Bukan perubahan redaksional dari indikator lama karena tidak memiliki padanan sebelumnya; menambah cakupan akuntabilitas pada Renstra baru.

L. Analisis Khusus Sektor PUPR: Dari “Berapa Banyak Dibangun” menuju “Seberapa Baik Manfaatnya”

Berdasarkan data yang tersedia pada kedua dokumen, pergeseran orientasi “output fisik” menuju “limpaknya manfaat/layanan” TERJADI secara jelas pada level Tujuan (I.T.1), namun BELUM merata ke seluruh sub-sektor PUPR pada level Sasaran, karena dokumen yang tersedia hanya merinci indikator komposit (bukan indikator per-sub-sektor seperti Jalan, Jembatan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Drainase, Bangunan Gedung/PBG-SLF, dan Sumber Daya Air secara terpisah).

Sub-sektor	Representasi pada IKU Lama	Representasi pada IKU Baru	Pergeseran Output→Outcome?
Jalan	Komponen “kemantapan jalan” dalam I.S.1 Indeks Konektivitas (fokus kondisi & konektivitas jaringan)	Komponen “Tingkat Kemantapan Jalan” dalam I.S.1 Indeks Infrastruktur baru (tetap berbasis kondisi fisik)	Belum bergeser — tetap ukuran kondisi jalan, bukan kepuasan pengguna jalan
Air Minum	Komponen dalam I.T.1 Indeks Infrastruktur Wilayah (lama)	Komponen “Ketahanan Air — akses layanan air minum layak” dalam I.S.1 baru, DAN tercakup dalam persepsi layanan pada IKLI (Tujuan)	Sebagian bergeser — tercakup ganda: sebagai indikator akses (Sasaran) dan sebagai bagian pengalaman layanan yang dinilai warga (Tujuan/IKLI)
Sanitasi	Komponen dalam I.T.1 lama	Komponen “akses sanitasi aman” dalam I.S.1 baru, dan tercakup IKLI	Sebagian bergeser, sama seperti Air Minum
Irigasi	Komponen dalam I.T.1 lama (persentase jaringan irigasi berfungsi)	Tidak disebutkan eksplisit dalam I.S.1 baru (variabel: jalan, air minum, sanitasi, transportasi, listrik, internet) — kemungkinan tercakup implisit dalam IKLI	Perlu klarifikasi — berpotensi “hilang” dari indikator komposit Sasaran; perlu dipastikan tetap dimonitor pada level program/kegiatan
Penataan Ruang / KKPR	I.S.2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (kepatuhan)	I.S.2 identik — tetap ukuran kepatuhan administratif, belum bergeser ke manfaat/outcome tata ruang	Tidak bergeser
Drainase, Jembatan, Bangunan Gedung/PBG-SLF, SDA lainnya	Tidak tercantum sebagai komponen eksplisit pada dokumen IKU Tujuan/Sasaran yang diunggah	Tidak tercantum sebagai komponen eksplisit pada dokumen IKU Tujuan/Sasaran yang diunggah	Tidak dapat dinilai dari dokumen ini — kemungkinan berada di level indikator program/kegiatan (IKK), bukan IKU

Catatan penting: dokumen yang diunggah hanya memuat IKU pada level Tujuan dan Sasaran (bukan level Program/Kegiatan). Indikator-indikator sub-sektor yang lebih rinci (Jembatan, Drainase, PBG/SLF, dsb.) kemungkinan besar berada pada dokumen Indikator Kinerja Program (IKP) atau Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terpisah dan tidak termasuk dalam cakupan analisis ini.

M. Tabel Pembuktian untuk Klarifikasi kepada Inspektorat

No	IKU Lama	IKU Baru	Keunggulan IKU Baru	Bukti Lebih Menantang	Data Pendukung	Kesimpulan
1	I.T.1 Indeks Infrastruktur Wilayah (baseline 65,00 → target 71,05)	I.T.1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur/IKLI (baseline 52,68 → target 64,76)	Mengukur outcome (kepuasan masyarakat) bukan output (kondisi fisik); metodologi baku nasional	Gap relatif naik dari 9,3% menjadi 22,9%; level naik dari output ke outcome; kontrolabilitas menurun	Dokumen IKU Lama & Baru, kolom Baseline/Target/Formula/Sumber Data	Jelas lebih menantang
2	I.T.2 Indeks Penataan Ruang (baseline 13,00 → target 100,00)	Dihentikan di level Tujuan; dilanjutkan sebagai S.2	Target lama (100%) secara metodologis tidak realistis relatif baseline 13%; substansi dilanjutkan dengan ukuran lebih wajar (kepatuhan tahunan, bukan kumulatif ekstrem)	Perbaikan realisme target, bukan penurunan tantangan	Perbandingan struktur indikator Tujuan: 2 (lama) vs 1 (baru)	Perlu penjelasan tambahan (bukan otomatis 'lebih menantang', namun 'lebih realistis dan lebih tepat sasaran')
3	I.S.1 Indeks Konektivitas (2 variabel; baseline—target 56,35→69,46)	I.S.1 Indeks Infrastruktur (6 variabel; baseline—target 56,35→69,46)	Cakupan lebih komprehensif (air minum, sanitasi, listrik, internet ditambahkan)	Kompleksitas & koordinasi lintas sektor naik signifikan (skor kompleksitas 2,0→3,7)	Formula pada kedua dokumen	Cenderung lebih menantang; target numerik perlu dikalibrasi ulang agar konsisten dengan formula baru
4	I.S.2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (100→100)	I.S.2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (100→100, identik)	Tidak ada	Tidak ada perubahan sama sekali	Angka identik di kedua dokumen	Tidak lebih menantang — direkomendasikan untuk ditinjau ulang pada periode berikutnya
5	Tidak ada padanan	I.S.3 Nilai Implementasi SAKIP (baseline 72 → target 80,12)	Penambahan dimensi akuntabilitas yang dinilai eksternal (Inspektorat)	Gap 11,3%; dinilai pihak eksternal independen	Dokumen IKU Baru	Indikator baru yang memperkuat kerangka akuntabilitas SAKIP

N. Keunggulan dan Peningkatan Tingkat Tantangan IKU Renstra 2026 (Narasi Formal)

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah dari Renstra sebelumnya menuju Renstra 2026–2030 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan pengukuran kinerja dengan prinsip akuntabilitas berbasis hasil (result-based performance management). Pada Renstra sebelumnya, indikator Tujuan (I.T.1 Indeks Infrastruktur Wilayah) mengukur kondisi fisik infrastruktur secara komposit administratif — pendekatan yang menggambarkan sisi penyedia layanan (berapa banyak dan sebaik apa infrastruktur dibangun) namun belum tentu mencerminkan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan.

Kelemahan mendasar dari pendekatan lama tersebut adalah rendahnya keterkaitan antara kondisi fisik infrastruktur dengan pengalaman nyata masyarakat, serta ketergantungan pada data administratif internal yang berisiko menimbulkan bias self-assessment. Sebagai perbaikan, IKU Renstra 2026–2030 pada level Tujuan diubah menjadi Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), yang diukur melalui survei kepuasan masyarakat mengacu pada

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Perubahan ini membawa peningkatan tingkat tantangan yang terbukti secara kuantitatif: gap antara baseline dan target meningkat dari 9,3% menjadi 22,9%, disertai pergeseran level pengukuran dari output menuju outcome. Pada level Sasaran, IKU S1 diperluas cakupannya dari dua variabel (kemantapan jalan dan konektivitas) menjadi enam variabel yang mencakup jalan, air minum, sanitasi, transportasi, listrik, dan internet, sehingga menuntut koordinasi lintas sektor yang lebih luas serta integrasi data dari pihak di luar kewenangan langsung DPUPR. Sementara itu, penambahan indikator baru pada Sasaran S3 (Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah) memperkuat dimensi akuntabilitas internal karena dinilai langsung oleh Inspektorat sebagai auditor independen, bukan sekadar pelaporan mandiri organisasi perangkat daerah.

Peningkatan tingkat tantangan tersebut secara langsung berimplikasi pada peningkatan manfaat bagi masyarakat, karena keberhasilan kinerja DPUPR kini diukur dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan layanan infrastruktur yang layak, bukan sekadar dari kuantitas output yang terealisasi. Perlu disampaikan secara jujur bahwa tidak seluruh perubahan pada dokumen ini mencerminkan peningkatan tantangan: indikator Sasaran S2 (Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) tidak mengalami perubahan formula, baseline, maupun target dari Renstra sebelumnya, sehingga tidak dapat diklaim sebagai bagian dari peningkatan tantangan dan akan menjadi bahan penyempurnaan pada evaluasi berikutnya.

Dengan demikian, perubahan IKU Renstra 2026–2030 secara keseluruhan mencerminkan peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi terutama pada level Tujuan, didukung oleh metodologi pengukuran yang lebih valid, sumber data yang lebih beragam, dan orientasi hasil yang lebih berpihak pada manfaat masyarakat. Klaim peningkatan tantangan disampaikan secara proporsional per level indikator agar dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dalam pemeriksaan Inspektorat.

O. Kesimpulan

1. IKU baru lebih menantang, TERUTAMA pada level Tujuan (IKLI), karena gap baseline-target meningkat dari 9,3% menjadi 22,9% dan level pengukuran bergeser dari output (kondisi fisik) menuju outcome (kepuasan masyarakat).
2. Perbedaan utama dengan IKU lama adalah pergantian metodologi pengukuran dari indeks komposit administratif internal menjadi survei kepuasan masyarakat berbasis regulasi nasional (PermenpanRB No.14/2017), serta penambahan indikator akuntabilitas eksternal (Nilai SAKIP oleh Inspektorat) pada level Sasaran.
3. Bukti objektif peningkatan tantangan adalah: (a) kenaikan gap relatif Tujuan 9,3%→22,9%; (b) kenaikan skor kompleksitas rata-rata Tujuan dari 2,6 menjadi 3,7; (c) kenaikan Challenge Index Tujuan dari 2,40 menjadi 4,00; (d) penurunan controllability karena ketergantungan pada persepsi masyarakat dan penilaian eksternal.

4. Keunggulan strategis IKU baru adalah orientasi outcome yang lebih kuat, metodologi pengukuran yang lebih valid dan terstandar secara nasional, serta cakupan akuntabilitas yang lebih komprehensif melalui penambahan penilaian eksternal (SAKIP).
5. Risiko yang masih perlu diperhatikan: (a) target Sasaran S1 belum dikalibrasi ulang meskipun formulanya diperluas dari 2 menjadi 6 variabel — berisiko dipertanyakan auditor sebagai inkonsistensi; (b) Sasaran S2 sama sekali tidak berubah dan tidak memiliki ambisi (target tetap 100%); (c) indikator I.T.2 (Penataan Ruang) dihentikan di level Tujuan sehingga cakupan Tujuan menyempit dari 2 menjadi 1 indikator, perlu narasi yang jelas bahwa substansinya dilanjutkan pada S2; (d) IKLI bergantung pada metodologi survei yang perlu dijaga konsistensi sampling dan periodenya agar data antar tahun dapat dibandingkan secara valid.
6. Data/bukti yang perlu disiapkan untuk pemeriksaan Inspektorat: (a) dokumen metodologi dan instrumen survei IKLI (jumlah responden, teknik sampling, 14 unsur SKM); (b) data historis realisasi IKU periode Renstra sebelumnya (2021–2025) untuk memperkuat analisis tren, karena dokumen yang tersedia saat ini hanya memuat kondisi awal 2025 dan target 2026–2030, belum realisasi tahun-tahun sebelumnya; (c) kertas kerja perhitungan Indeks Infrastruktur S1 baru yang menjelaskan bobot/kontribusi tiap dari enam variabel serta sumber data masing-masing (PLN untuk listrik, penyedia telekomunikasi untuk internet, PDAM untuk air minum); (d) dasar pertimbangan/berita acara penghentian I.T.2 sebagai indikator Tujuan dan pengalihannya ke S2; (e) rencana tindak lanjut untuk mengevaluasi ambisi target S2 pada penyusunan Perubahan Renstra berikutnya.